

## PERENCANAAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SINTESIS KONSEP AT-TAKHTHITH DENGAN MODEL PERENCANAAN PENDIDIKAN MODERN

Ramlis Harman Susanto<sup>1</sup>, Surya Adri<sup>2</sup>, Asmendri<sup>3</sup>, Milya Sari<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Jl. Jenderal Sudirman No.137, Sumatera Barat, Indonesia

<sup>4</sup>UIN Imam Bonjol Padang, Jl. Jenderal Sudirman No.15, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: [ramlis.hs@gmail.com](mailto:ramlis.hs@gmail.com)

---

### Article History

Received: 16-12-2025

Revision: 26-12-2025

Accepted: 28-12-2025

Published: 31-12-2025

**Abstract.** Educational planning is a crucial element that determines the success of educational systems in facing global dynamics and technological disruption. This study aims to synthesize the concept of educational planning from an Islamic perspective (at-takhthith) with modern planning models and analyze its challenges in the era of the Independent Curriculum (Kurikulum Merdeka) and digitalization. Using a qualitative approach with a library research method, data were analyzed inductively and thematically from various scientific literatures ranging from 2020 to 2025. The results indicate that planning in Islam is a theological imperative aimed at forming holistic individuals through the integration of faith (IMTAQ) and science-technology (IPTEK). Managerially, planning functions as a directional guide, a tool for efficiency, and a standard for supervision. This study concludes that a participatory or mixed planning model is the most ideal for balancing national macro-policies with school micro-autonomy. However, field implementation still faces structural challenges, particularly in 3-T areas regarding limited digital infrastructure and teacher competency readiness. The research recommends the need to strengthen school principals' digital leadership and the implementation of Data-Based Planning (PBD) to enhance accountability and sustainable educational quality

**Keywords:** Educational Planning; Strategic Management; Islamic Principles; Independent Curriculum; Digital Era

**Abstrak.** Perencanaan pendidikan merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan sistem pendidikan dalam menghadapi dinamika global dan disrupsi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis konsep perencanaan pendidikan dalam perspektif Islam (at-takhthith) dengan model perencanaan modern serta menganalisis tantangannya di era Kurikulum Merdeka dan digitalisasi. Menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan, data dianalisis secara induktif dan tematik dari berbagai literatur ilmiah rentang tahun 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dalam Islam merupakan imperatif teologis yang bertujuan membentuk individu secara holistik melalui integrasi IMTAQ dan IPTEK. Secara manajerial, perencanaan berfungsi sebagai pedoman arah, alat efisiensi, dan standar pengawasan. Penulisan ini menyimpulkan bahwa model perencanaan partisipatif atau campuran adalah yang paling ideal untuk menyeimbangkan kebijakan makro nasional dengan otonomi mikro sekolah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural, terutama di daerah 3-T terkait keterbatasan infrastruktur digital dan kesiapan kompetensi guru. Penelitian merekomendasikan perlunya penguatan kepemimpinan digital kepala sekolah dan penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) untuk meningkatkan akuntabilitas dan mutu pendidikan berkelanjutan

**Kata Kunci:** Perencanaan Pendidikan; Manajemen Strategis; Prinsip Islami; Kurikulum Merdeka; Era Digital

---

**How to Cite:** Susanto, R. H., Adri, S., Asmendri., & Sari, M. (2025). Perencanaan Pendidikan dalam Perspektif Islam: Sintesis Konsep At-Takhthith dengan Model Perencanaan Pendidikan Modern. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (8), 12561-12569. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i8.4847>

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Amanat konstitusional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi strategis dalam pengembangan SDM. Di tengah arus globalisasi dan disrupsi teknologi, sistem pendidikan yang diselenggarakan tanpa perencanaan yang sistematis dan terarah akan kehilangan relevansinya, menyebabkan tujuan menjadi kabur dan sumber daya terbuang sia-sia. Oleh karena itu, perencanaan merupakan langkah awal yang krusial dan menentukan keberhasilan seluruh proses pendidikan (Suhada, 2020).

Dalam perspektif Islam, perencanaan (*at-takhthith*) bukan sekadar konsep manajerial, melainkan sebuah keharusan spiritual dan intelektual. Al-Qur'an memberikan arahan eksplisit tentang pentingnya berpikir ke depan dan mempersiapkan bekal untuk masa depan (Q.S. Al-Hashr: 18) (Nuraeni & Mujahidin, 2021). Kisah Nabi Yusuf A.S. dalam merencanakan ketahanan pangan Mesir (Q.S. Yusuf: 48-49) juga menjadi contoh monumental tentang perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana. Hal ini memberikan landasan teologis bahwa perencanaan adalah wujud kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan masa depan (Maulidia & Ashari, 2023).

Urgensi perencanaan pendidikan di Indonesia kian penting dalam menghadapi berbagai tantangan sistemik. Permasalahan kronis seperti disparitas mutu dan akses antara wilayah perkotaan dan daerah 3-T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), rendahnya kompetensi guru, hingga ketidakselarasan lulusan dengan tuntutan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) menuntut adanya strategi yang komprehensif dan berwawasan ke depan (Suhada, 2020). Perencanaan yang matang memungkinkan dilakukannya diagnosis masalah secara mendalam, penyusunan skala prioritas, dan perumusan strategi intervensi yang terukur (Sa'ud & Makmun, 2011).

Kebijakan berskala besar seperti implementasi Kurikulum Merdeka (KM) merupakan respons langsung terhadap kebutuhan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Keberhasilan reformasi kurikulum ini, yang menuntut adanya perubahan filosofi dan praktik pembelajaran, sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan di setiap tingkatan, mulai dari nasional (makro) hingga ruang kelas (mikro). Mengingat pesatnya perkembangan teknologi (TIK), perencanaan harus mampu mengintegrasikan aspek digitalisasi dan memastikan TIK digunakan secara efektif, bahkan di tengah keterbatasan infrastruktur (Meilani & Najib, 2020)..

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data dan informasi yang dihimpun bersumber dari berbagai literatur ilmiah, termasuk buku referensi, laporan penelitian, artikel jurnal akademik yang terindeks (Rentang 2020-2025), serta dokumen-dokumen kebijakan terkait perencanaan pendidikan. Teknik pengumpulan data yang utama adalah dokumentasi, yaitu penelusuran data berupa catatan peristiwa, tulisan, dan karya monumental yang relevan dengan topik yang dikaji. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis secara induktif dan tematik melalui analisis isi (*content analysis*). Proses analisis ini melibatkan identifikasi tema-tema utama, perbandingan pandangan para ahli, serta sintesis untuk menghasilkan model konseptual perencanaan pendidikan yang komprehensif, terintegrasi dengan perspektif Islam dan tantangan kontemporer

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Perspektif Islami dan Landasan Filosofis**

Perencanaan dalam Islam (*at-takhtith*) merupakan imperatif teologis. Ayat-ayat Al-Qur'an menekankan pentingnya perencanaan (*planning*) sebagai bentuk tanggung jawab seorang hamba terhadap masa depan (*wal tandhur nafsum ma qaddamat lighad*). Tujuan perencanaan pendidikan Islam bersifat holistik: membentuk individu yang beriman dan bertakwa (*IMTAQ*) dan terampil dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (*IPTEK*) (Sahnan, 2017), sehingga mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Landasan perencanaan harus kokoh, mencakup:

- Landasan Hukum: Mengacu pada UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas) yang mengamanatkan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik (spiritual, moral, kecerdasan, keterampilan) (Nuraeni & Mujahidin, 2021).
- Landasan Filosofis: Bersumber dari filsafat pendidikan (Pancasila di Indonesia) yang menjadi asumsi tentang hakikat realitas, manusia, pengetahuan, dan nilai, yang kemudian mengarahkan tujuan dan materi kurikulum (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Landasan Integratif: Perencanaan pendidikan Islam menganut prinsip *integral* dan *terpadu*. Ilmu agama (*syariah*) dan ilmu sains (*kauniyah*) adalah satu kesatuan yang tidak dikotomi (Nuraeni & Mujahidin, 2021).

## Urgensi, Tujuan, dan Fungsi Perencanaan Manajerial

### *Urgensi Perencanaan Pendidikan*

Perencanaan memegang posisi strategis dan sentral dalam manajemen pendidikan karena berfungsi sebagai penentu dan penunjuk arah bagi seluruh kegiatan (Ichsan, 2021) . Urgensinya diperkuat oleh beberapa faktor:

- Penyedia Arah dan Standar: Memberikan kejelasan arah bagi penyelenggaraan pendidikan dan menjadi tolak ukur (*standar pengawasan*) terhadap pelaksanaan program (Sa’ud & Makmun, 2011).
- Efisiensi dan Pengendalian: Menghemat pemanfaatan sumber daya (biaya, waktu, tenaga) dan meminimalkan kegiatan yang tidak produktif. Perencanaan juga menjadi alat kontrol untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini (Sa’ud & Makmun, 2011).
- Antisipasi: Memungkinkan manajer memprediksi kesulitan dan ketidakpastian di masa depan (*forecasting*) dan merumuskan langkah antisipatif (Sa’ud & Makmun, 2011).

### *Tujuan dan Fungsi Manajerial*

Tujuan perencanaan pendidikan berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif dan efisien.

**Tabel 1.** Perencanaan pendidikan berorientasi pada pencapaian hasil

<b>Tujuan Utama</b>	<b>Fungsi Esensial</b>
Menetapkan standar untuk pengawasan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan.	Pedoman Pelaksanaan: Memberikan arahan yang jelas ( <i>what, why, who, when, where, how</i> ) kepada semua unsur pelaksana (Sa’ud & Makmun, 2011).
Mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya (menghemat biaya, tenaga, waktu) dan meminimalkan kegiatan tidak produktif (Sa’ud & Makmun, 2011).	Pengendalian dan Evaluasi (Control): Menjadi alat untuk mencocokkan pelaksanaan dengan rencana yang telah disusun (Sa’ud & Makmun, 2011).
Mengarahkan pencapaian tujuan secara terpadu ( <i>integral</i> ) dan sistematis (Sa’ud & Makmun, 2011).	Peramalan (Forecasting): Memperkirakan kondisi masa depan dan mempersiapkan alternatif keputusan (Sa’ud & Makmun, 2011).
Menyusun skala prioritas (sasaran dan kegiatan) agar proses pekerjaan lebih terstruktur (Sa’ud & Makmun, 2011).	Penjaminan Mutu ( <i>Quality Assurance</i> ): Memastikan proses dan hasil pendidikan mencapai standar kualitas yang diharapkan (Sa’ud & Makmun, 2011).
Memudahkan koordinasi antarpihak terkait untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan (Sa’ud & Makmun, 2011).	Alokasi Sumber Daya: Memilih alternatif terbaik untuk pemanfaatan SDM dan anggaran secara optimal (Sa’ud & Makmun, 2011).

## **Prinsip dan Ruang Lingkup Perencanaan**

### *Prinsip-Prinsip Fundamental*

Kualitas sebuah rencana ditentukan oleh ketaatan pada prinsip-prinsip fundamental yang menjamin kelayakan implementasi:

- Komprehensif dan ilmiah: perencanaan harus mencakup seluruh aspek esensial pendidikan (formal, non-formal, semua jenjang) dan disusun secara sistematis berdasarkan data yang akurat (*evidence-based*) (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Interdisipliner: perencanaan harus menyangkut berbagai bidang keilmuan (sosiologi, ekonomi, politik) untuk mengatasi kompleksitas masalah dan memastikan relevansi dengan kehidupan masyarakat (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Fleksibel dan adaptif: rencana harus bersifat lentur, dinamis, dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Iptek*) (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Efektivitas dan efisiensi: perencanaan harus menghasilkan *output* yang maksimal (*effectiveness*) dengan penggunaan sumber daya yang minimal (*efficiency*) (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Partisipatif dan kooperatif: mendorong kolaborasi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama (*team work*) (Sa'ud & Makmun, 2011).

Penting untuk dicatat bahwa upaya mencapai rencana yang sangat komprehensif dan partisipatif dapat menimbulkan tensi dinamis, di mana proses menjadi lambat dan berisiko bertentangan dengan prinsip efisiensi dan fleksibilitas.

### *Dimensi dan Ruang Lingkup*

Ruang lingkup perencanaan dapat dipetakan berdasarkan tingkatan (*magnitude*) dan jangka waktu (*time horizon*):

- Perencanaan makro: dilakukan pada tingkat nasional (Pemerintah Pusat). Menetapkan kebijakan, tujuan, dan strategi umum (misalnya, perencanaan Kurikulum Inti SMA atau penerimaan mahasiswa baru nasional). Tujuannya adalah pengembangan SDM secara kualitatif dan kuantitatif untuk kebutuhan pembangunan (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Perencanaan meso: penjabaran kebijakan makro ke dalam program berskala regional atau institusional. Bersifat lebih operasional (misalnya, Renstra Dinas Pendidikan Provinsi atau Rencana Pengembangan Sekolah/RPS) (Sa'ud & Makmun, 2011).

- Perencanaan mikro: perencanaan di tingkat institusional atau kelas. Bersifat sangat rinci dan operasional (misalnya, penyusunan RPP/Modul Ajar atau kegiatan belajar mengajar) (Sa'ud & Makmun, 2011).

**Tabel 2.** Bentuk perencanaan berdasarkan waktu

Jangka Waktu	Rentang Waktu	Sifat	Contoh
Jangka Panjang	10 hingga 25 tahun	Visioner, Strategis	Visi Pendidikan Nasional 2045.
Jangka Menengah	4 hingga 10 tahun	Strategis, Taktis	Rencana Strategis (Renstra) Lembaga.
Jangka Pendek	≤ 1 tahun	Operasional, Detail	Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

**Model dan Pendekatan Perencanaan**

Model perencanaan mencerminkan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan:

- Model Sentralistik (*Top-Down*): Keputusan dari pusat (Kementerian). Menjamin keseragaman, tetapi berisiko kurang relevan dengan konteks lokal.
- Model Desentralistik (*Bottom-Up*): Inisiatif dari bawah (Sekolah/Komunitas). Menjamin relevansi dan partisipasi, tetapi berisiko fragmentasi.
- Model Partisipatif/Campuran: Menggabungkan kerangka nasional dengan otonomi lokal, yang dianggap paling ideal di era desentralisasi. MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan Kurikulum Merdeka adalah manifestasi desentralisasi ini (Arwildayanto et al., 2018).

Pendekatan perencanaan berdasarkan fokus analisis meliputi:

- Pendekatan Kebutuhan Sosial (*Social Demand*): Berfokus pada pemerataan akses dan pemenuhan hak dasar pendidikan (tradisional) (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Pendekatan Ketenagakerjaan (*Manpower*): Berfokus pada relevansi lulusan dengan kebutuhan industri (*link and match*) (Ikhwan, 2016).
- Pendekatan Efektivitas Biaya (*Cost-Effectiveness*): Berfokus pada analisis keuntungan (*benefit*) versus biaya (*cost*) untuk memilih program yang paling efisien (Sa'ud & Makmun, 2011).

**Siklus Proses Perencanaan**

Perencanaan adalah siklus yang berkesinambungan, yang harus dilaksanakan secara berulang dan teratur untuk perbaikan yang berkelanjutan. Tahapan utama dalam siklus perencanaan (yang setara dengan siklus PDCA: *Plan, Do, Check, Action*) meliputi:

- Pengumpulan data dan diagnosis (*need assessment*): tahap awal untuk mengidentifikasi kesenjangan (*gap*) antara kondisi riil (*das sein*) dengan harapan (*das sollen*) (Nurhayati, 2021). Menggunakan data faktual dan informasi.

- Perumusan kebijakan dan strategi (*policy & strategy formulation*): menetapkan tujuan yang jelas (SMART) dan merumuskan kebijakan umum sebagai pembatasan gerak bagi keputusan lebih rinci (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Penyusunan program dan anggaran (*program & budgeting*): menerjemahkan strategi menjadi program aksi yang detail, termasuk alokasi sumber daya dan biaya (seperti RKAS).
- Implementasi rencana (*plan implementation*): pelaksanaan program nyata sesuai jadwal (Maulidia & Ashari, 2023).
- Monitoring dan evaluasi (*monev*): mengawasi proses, menilai tingkat keberhasilan (*efektivitas* dan *efisiensi*) berdasarkan kriteria relevansi, dan mencatat hambatan (Sa'ud & Makmun, 2011).
- Revisi dan Perencanaan Ulang (*Revision*): Hasil evaluasi menjadi umpan balik (*feedback*) untuk menyempurnakan rencana pada siklus berikutnya (Sa'ud & Makmun, 2011).

### **Tantangan Kurikulum Merdeka di Era Digital**

Meskipun Kurikulum Merdeka (KM) memberikan kebebasan, implementasinya di Indonesia, khususnya di daerah 3-T, menghadapi tantangan struktural yang signifikan (Saiman et al., 2025).

- Infrastruktur dan akses: keterbatasan akses listrik dan jaringan internet yang tidak merata menjadi hambatan utama. Program digitalisasi seperti platform Merdeka Mengajar tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh guru di daerah 3-T karena kendala koneksi dan biaya operasional (seperti genset) yang tinggi (Meilani & Najib, 2020).
- Kesiapan guru: mayoritas guru menyatakan ketidaksiapan terhadap KM karena minimnya pelatihan dan pendampingan yang intensif. Guru kesulitan dalam menyusun Modul Ajar yang kontekstual dan melakukan asesmen pembelajaran sesuai filosofi KM (Saiman et al., 2025).

### **Kepemimpinan Digital dan TIK Integrasi**

Kepemimpinan kepala sekolah memegang peran krusial (*digital leadership*) untuk mengarahkan transformasi digital dan mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran (Meilani & Najib, 2020).

- Profil kepemimpinan: kepala sekolah yang efektif menunjukkan tingkat kepemimpinan digital yang tinggi, terutama dalam aspek *kepemimpinan visioner* dan *pengembangan profesional*. Kepemimpinan ini berdampak positif pada penggunaan teknologi oleh guru, terutama untuk komunikasi dan tugas administrasi (Meilani & Najib, 2020).

- Hambatan integrasi: meskipun kepala sekolah menunjukkan visi digital yang kuat, integrasi teknologi instruksional masih terhambat oleh keterbatasan infrastruktur (komputer, internet) dan kompetensi digital guru yang tidak merata. Pelatihan TIK bagi guru harus berkelanjutan dan disesuaikan dengan kerangka TPACK (Technology Pedagogical Content Knowledge) untuk memastikan integrasi teknologi yang efektif (Meilani & Najib, 2020).

### **Perencanaan Berbasis Data (PBD)**

Perencanaan modern harus didasarkan pada data (*evidence-based*) untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas. Data adalah fakta yang divalidasi, digunakan untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi kebijakan, dan merancang intervensi yang tepat. PBD memastikan bahwa keputusan alokasi sumber daya, strategi, dan program didasarkan pada realitas empiris, bukan asumsi semata (Mudatsir et al., 2024).

### **KESIMPULAN**

Perencanaan pendidikan merupakan proses manajerial yang sistematis, rasional, dan berkelanjutan, yang sangat diperlukan untuk mengarahkan sistem pendidikan agar mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Hakikat perencanaan telah meluas, mengintegrasikan dimensi teologis Islam (bertanggung jawab pada masa depan) dengan ilmu manajemen modern. Urgensi perencanaan dalam konteks nasional terletak pada perannya sebagai kompas strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik, serta sebagai prasyarat keberhasilan reformasi kurikulum, terutama di era Kurikulum Merdeka dan digitalisasi. Pelaksanaannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip fundamental seperti komprehensif, fleksibel, terintegrasi, dan partisipatif. Pilihan model perencanaan yang ideal adalah model campuran, yang menyeimbangkan arahan nasional (makro) dengan otonomi lokal (mikro). Keseluruhan proses ini berjalan dalam siklus yang dinamis—dari analisis kebutuhan, perumusan tujuan, implementasi, monitoring, evaluasi, hingga revisi—memastikan adanya perbaikan mutu yang berkelanjutan. Meskipun tantangan kontemporer seperti keterbatasan infrastruktur di daerah 3-T dan perlunya peningkatan kompetensi digital guru masih menjadi kendala, efektivitas perencanaan dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan digital yang kuat dan adopsi Pendekatan Berbasis Data.

Berdasarkan simpulan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi praktis. Bagi pembuat kebijakan, penting untuk terus memperkuat model perencanaan partisipatif yang menjamin penyerapan aspirasi dari tingkat operasional (sekolah/guru). Perlu juga ada investasi serius dalam perbaikan infrastruktur dasar (listrik dan internet) di daerah 3-T untuk mendukung penuh

inisiatif digital seperti platform Merdeka Mengajar. Bagi praktisi pendidikan, Modul Ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) harus diposisikan sebagai alat strategis untuk peningkatan mutu pembelajaran yang kontekstual, bukan sekadar beban administratif semata. Para kepala sekolah harus proaktif menjadi pemimpin digital yang visioner, mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi TIK mereka secara berkelanjutan

## REFERENSI

- Arwildayanto, Suking, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cendekia Press.
- Ichsan, F. N. (2021). Implementasi Perencanaan Pendidikan dalam Meningkatkan Karakter Bangsa Melalui Penguatan Pelaksanaan Kurikulum. *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 281–300. <https://doi.org/10.47945/al-riwayah.v13i2.399>
- Ikhwan, A. (2016). Manajemen Perencanaan Pendidikan Islam (Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist). *Edukasi*, 4(1), 128–155.
- Maulidia, B. M., & Ashari, M. Y. (2023). Pengantar Perencanaan Pendidikan Islam. *Ats-Tsaqofi: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 5(2), 11–20.
- Meilani, R. I., & Najib, M. (2020). Perencanaan Pembelajaran pada Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 176–186. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.298>
- Mudatsir, Harahap, R. R., Fitriyati, I., Talindong, A., Thoif, M., Chairunnisa, Arini, D., Nababan, H. S., Munandar, H., Hadikusumo, R. A., Ariantara, R. G., Purwana, R., Nikmah, S. A. N., Maulani, G., Susilowati, N. E., Pratiwi, D., & Nurdini. (2024). *Perencanaan Program Pendidikan* (A. C. Purnomo (ed.)). PT Sada Kurnia Pustaka.
- Nuraeni, N., & Mujahidin, E. (2021). Landasan dan Prinsip-Prinsip Perencanaan Pendidikan Islam. *Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education*, 2(2), 104–121. <https://doi.org/10.32832/itjmie.v2i2.4596>
- Nurhayati. (2021). Desain Perencanaan Pendidikan dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 14–27. <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i1.121>
- Sa'ud, U. S., & Makmun, A. S. (2011). *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*. Remaja Rosdakarya.
- Sahnan, M. (2017). Urgensi Perencanaan Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, 12(2), 142–159.
- Saiman, R., Rusdianto, & Kasman, R. (2025). Ketercapaian Kurikulum Merdeka dan Kesiapan Guru di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3-T). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v10i1.5595>
- Suhada. (2020). Problematika, Peranan dan Fungsi Perencanaan Pendidikan di Indonesia. *Andragogi*, 2(3), 147–162. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i3.66>